AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009

(Studi Tentang: Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Biaya Pemotongan Hewan Dan Penjualan Hasil Perkebunan)

SKRIPSI

Oleh:

Rawati Gustika

06 193 001

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

ABSTRAK

Rawati Gustika, 06193001, skripsi dengan judul *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.* Studi tentang: Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Sektor Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Biaya Pemotongan Hewan Dan Penjualan Hasil Prekebunan. Sebagai Pembimbing I Arnaldi, SE. MSI dan Pembimbing II Doni Hendrik, SIP, M.Soc, SC.

Implementasi dari *good governance* tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat, tetapi juga dilaksanakan di pemerintahan lokal. Dalam hal ini, keberhasilan dari konsep *good governance* adalah membuat suatu pemerintah bekerja lebih kondusif dan baik. Kemudian untuk melihat pelaksanaan konsep *good governance* di daerah Kabupaten Pasaman Barat berjalan atau tidak. Untuk itu kita dapat melihat dari dua indikator dalam prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini dikaitkan dengan tiga sektor, yaitu sektor pajak sarang burung walet, retribusi biaya pemotongan hewan dan penjualan hasil perkebunan.

Penelitian ini menggunakan prinsip *good governance* (penelitian hanya difokuskan pada dua indikator dari sembilan prinsip *good governance*) khususnya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan dengan pemilihan informan secara sengaja (*Purposive Sampling*). Unit analisis adalah institusi atau lembaga yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Peternakan dan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan uji keabsahan data (triangulasi) untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan.

Dari penelitian ini diketahui bahwa proses pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak sarang burung walet, retribusi biaya pemotongan hewan dan penjualan hasil perkebunan masih rendah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009. Hal ini terjadi, karena masih kurangnya kerjasama dan sosialiasasi antara masyarakat, sektor swasta dan pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana yang ada, belum memiliki standar operasional yang jelas dan belum memiliki aturan hukum yang kuat. Jadi untuk mengatasi semua itu diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta, membuat aturan hukum yang jelas, meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang, menetapkan standar operasional, guna mencapai terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik dan efisien di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

Kata kunci : *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparansi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di ganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, telah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu isu yang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah termasuk masalah *good governance*[1] (pemerintahan yang baik). Dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah Indonesia, muncul beberapa kecenderungan yang menyedihkan, yaitu: (1) kuatnya semangat memungut retribusi, pajak, maupun pungutan lainnya, namun kurang diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik secara optimal; (2) rendahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah maupun DPRD[2].

Pemahaman umum tentang *good governance* (pemerintahan yang baik) mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada era tahun 2000-an. *Good governance* (pemerintahan yang baik) dikatakan sebagai tata pemerintahan, maksudnya adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik

---

[1] *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian yang konstruktif di antara pilar negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sjahmunir AM, SH, dkk. *Pemerintah Nagari Dan Tanah Ulayat*. Andalas University Press. Padang. 2006. hal. 56

[2] Mudrajad Kuncoro. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Erlangga. Jakarta. 2004. hal. 258

dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat[3]. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi.

Dalam *good governance* (pemerintahan yang baik) proses akuntabilitas[4] dan transparansi[5] merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Sedangkan transparansi adalah terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan proses pemerintahan melalui suatu manajemen

---

[3] Dokumen Kebijakan UNDP : *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan* ", Dalam Buletin Informasi Program Kemitraan Untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Di Indonesia Tahun 2000

[4] Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik.* Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2005

[5] Transparansi adalah terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan proesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI. 1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dalam melaksanakan prinsip *good governance*, khususnya upaya pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pajak sarang burung walet, retribusi biaya pemotongan hewan dan penjualan hasil perkebunan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan dan komitmen yang jelas yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pelaksanaan *good governance* tersebut, khususnya dalam memberikan pertanggungjawaban kebijakan yang dibuat kepada masyarakat, penetapan aturan hukum yang jelas dalam memberikan sanksi serta masih kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat maupun pihak swasta.

2. Dalam proses pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak sarang burung walet, retribusi biaya pemotongan hewan dan penjualan hasil perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 juga belum terlaksana. Karena kurangnya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Bacaan

Budiarjo, Meriam, 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa.* Jakarta: Penerbit Sinar Harapan

Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Dwiyanto, Agus, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University press, hal 229

Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang.* Jakarta: Penerbit Erlangga

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratization.* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Said, Mas'ud, 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia. Malang*: Universitas Muhammadiyah Malang

Setyawan Salam, Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia.* Jakarta.

Siahaan, Marihot, 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT Grafindo Persada

Sjahmunir, dkk, 2006. *Pemerintah Nagari dan Tanah Ulayat.* Padang: Andalas University Press

Suranda, 1997. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Syaukani, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yani, Ahmad, 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pusaka

Widjaja, Haw, 2003. *Titik Berat Otoda Pada Daerah Tingkat II.* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada

Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2009, Kerjasama Kepala Bappeda MANUS HANDRI, SH dengan Kepala BPS CHARDIMAN, S.ST, MM.